

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI**

**Yoseph Batkunde**  
[ybatkunde@gmail.com](mailto:ybatkunde@gmail.com)  
**Universitas Lelemuku Saumlaki**

### **Abstrak**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi yang berkelanjutan untuk kepentingan pemangku kepentingan internal dan eksternal pendidikan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, staf, komunitas, dunia usaha, profesional, asosiasi dan Pemerintah puas dengan kinerja dan hasil universitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, (2) monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal, dan (3) tindak lanjut sistem penjaminan mutu internal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatori. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan pencatatan. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase untuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan SPMI berada pada kategori efektif, (2) monitoring dan evaluasi SPMI berada pada kategori efektif, dan (3) tindak lanjut SPMI berada pada kategori cukup efektif. Untuk itu, direkomendasikan perlunya penguatan proses perbaikan berkelanjutan penjaminan mutu internal dan lebih memperkuat kerjasama dan komitmen dengan pimpinan akan pentingnya penerapan penjaminan mutu internal serta bersinergi dalam mensosialisasikan standar SPMI kepada seluruh dosen dan dosen. staf UNLESA.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Standar Operasional Prosedur.

### **PENDAHULUAN**

Sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan baik. Penjaminan mutu perlu dijadikan sebagai alat pengendalian mutu/surveilan mutu pada lembaga pendidikan. Membangun lembaga pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendidik, dan penyelenggara pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas.

Institusi pendidikan tinggi berada di garda depan pengembangan masyarakat. Sebab, pendidikan tinggi ada “tiga jalur”, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Transformasi institusi pendidikan tinggi harus berkelanjutan dan selalu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pendidikan tinggi berkualitas tinggi sangat penting bagi suatu negara. Khususnya bagi negara-negara berkembang. Pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam transformasi suatu negara secara keseluruhan. Diantaranya; 1) Pendidikan tinggi dapat dan harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara; 2) Pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan demokrasi suatu negara dan dengan demikian peremajaan politik dan sosial; dan penegasan, 4) pendidikan tinggi membantu memperkuat posisi dan reputasi negara di kancah internasional (Matei & Iwinska, 2016).

Tabel 1. Hasil Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Status dan Peringkat Akreditasi</b>
1	Sarjana	Manajemen	Baik
2	Sarjana	Ekonomi Pembangunan	Baik
3	Diploma III	Akuntansi	Baik
4	Sarjana	Ilmu Administrasi Negara	Baik

5	Sarjana	Ilmu Administrasi Niaga	Baik
6	Sarjana	Pendidikan Matematika	Baik
7	Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris	Baik
8	Sarjana	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Baik
9	Sarjana	Hukum	Baik
10	Sarjana	Sosial Ekonomi Perikanan	Baik
11	Sarjana	Teknologi Hasil Perikanan	Baik
12	Sarjana	Akuakultur	Baik

Data: <https://www.banpt.or.id/>

Berdasarkan data hasil akreditasi program studi Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa pendidikan yang diselenggarakan UNLESA masih belum dapat dikatakan berkualitas. Seluruh program studi di UNLESA tetap terakreditasi dengan nilai C/Baik, berdasarkan hasil penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi independen (LAM). Oleh karena itu, UNLESA perlu melakukan perbaikan dan terus meningkatkan kualitasnya.

Hal terpenting untuk memperoleh sertifikasi yang baik adalah dengan menerapkan model penjaminan mutu. Diharapkan dapat menumbuhkan budaya mutu mulai dari cara merumuskan standar, menerapkan standar, mengevaluasi penerapan standar, dan terus mengupayakan peningkatan standar. Dengan meningkatkan kualitas internal terlebih dahulu, bisa dipastikan proses sertifikasinya juga akan baik (Papatungon, I., Ansar, A., & Mas, S. R., 2021).

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan untuk menjamin terwujudnya standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, budaya mutu diharapkan tumbuh dan berkembang di lingkungan pendidikan tinggi. Di sinilah perguruan tinggi sendiri yang mengontrol penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan upaya universitas sebagai pelaksana untuk mencetak lulusan yang berkualitas (Arifudin, O., 2019).

Berdasarkan permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) yang menyatakan 3 (tiga) system penjaminan mutu terdiri:

- 1) Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
- 2) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
- 3) Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI).

Hal ini untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya. Namun tidak semua perguruan tinggi mampu menerapkan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan pendekatan manajemen. Dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk mengakomodasi system penjaminan mutu internal dan eksternal maupun dalam mengoptimalkan pelaporan pada pangkalan data Pendidikan tinggi. Sehingga dibutuhkan manajemen system penjaminan mutu internal dalam mengembangkan sebuah perguruan tinggi dalam mencapai standarisasi akreditasi. Dibutuhkan pola system penjaminan mutu internal berdasarkan Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Permenristekdikti yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Evaluasi;
- 4) Pengendalian; dan
- 5) Peningkatan.

Menurut buku pedoman SPMI yang disusun oleh Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu 2018 terdapat beberapa jenis SPMI, yaitu SPMI jenis pendidikan akademik, SPMI jenis pendidikan vokasi dan jenis pendidikan profesi. Dalam penelitian ini, peneliti

memfokuskan pada implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam SPMI yang menyangkut dengan proses kegiatan pembelajaran di Universitas Lelemuku Saumlaki.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa SPMI adalah suatu proses yang secara independen, konsisten dan berkelanjutan menentukan dan memenuhi standar mutu pendidikan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa mutu memenuhi kemampuan yang telah diidentifikasi atau berkomitmen. Kualitas dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Menurut Papatungan, I., Ansar, A., & Mas, S. R, 2021, SOP merupakan landasan atau pedoman dalam menjalankan tugas, alat untuk mengukur kinerja, dan juga dapat memberikan rasa percaya diri kepada setiap anggota organisasi untuk melakukan setiap langkah pekerjaan. Selain itu juga dijelaskan bahwa SOP merupakan suatu standar dan prosedur yang dijadikan acuan dalam bekerja, digunakan juga untuk mengukur kinerja atau sebagai tolok ukur penilaian kinerja, sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan standar dan prosedur, sehingga kinerja dan pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang ada dan konten yang digunakan.

Selain itu efektivitas menurut (Batkunde, Y., Pd, S., & Pd, M, 2022) merupakan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana supervisi menghasilkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Lelemuku Saumlaki, 2) Untuk mengetahui bagaimana monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal di Universitas Lelemuku Saumlaki, 3) Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari sistem penjaminan mutu internal di Universitas Lelemuku Saumlaki.

## **METODELOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatori untuk memperkuat hasil dari keterangan, informasi, data yang sudah ada sebelumnya. Indikator pada penelitian ini antara lain 1) pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, 2) monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal, 3) tindak lanjut sistem penjaminan mutu internal. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA), dosen dan pegawai di Universitas Lelemuku Saumlaki sebanyak 50 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling yaitu sampling purpose. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan menggunakan skala likert yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia kerja, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. LPMA UNLESA telah menyusun konsep dan kebijakan sistem penjaminan mutu internal. Konsep dan kebijakan SPMI tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan untuk kepuasan stakeholders. Implementasi SPMI di UNLESA dilaksanakan sebagai sebuah keharusan karena mutu pendidikan tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi juga tergantung pada penilaian para pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 4 – 15 April 2024 di Universitas Lelemuku Saumlaki diperoleh data efektivitas hasil presentasi terkait dengan sistem penjaminan mutu internal yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman presentase skor efektivitas pelaksanaan SPMI

No	Sub Indikator	Total Skor	Index (%)	Kategori
1	Pelaksanaan SPMI	192	38,4 %	Sesuai
2	Monitoring dan Evaluasi SPMI	176	35,2 %	Sesuai
3	Tindak Lanjut SPMI	144	28,8 %	Cukup Sesuai
	<b>Rata-Rata</b>	<b>512</b>	<b>34,13 %</b>	<b>Sesuai</b>

Tabel 2 menunjukkan efektivitas pelaksanaan SPMI di Universitas Lelemuku Saumlaki berada pada kategori sesuai dengan perolehan total skor 192 dan index 34.4%. Hasil yang diperoleh dari setiap indikator menunjukkan bahwa efektivitas SPMI dalam pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini.

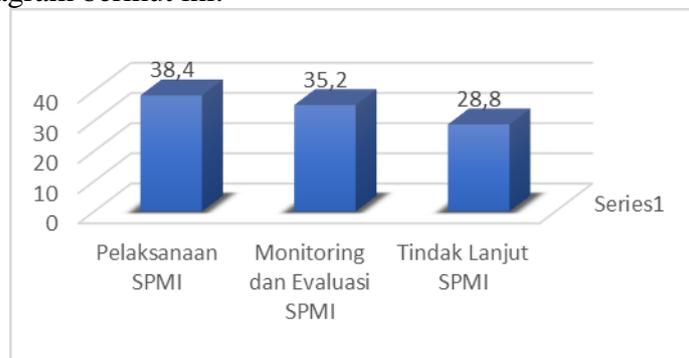


Diagram 1. Efektivitas Pelaksanaan SPMI di UNLESA

### Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI (Standar Dikti), yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi 1) standar nasional Pendidikan, 2) standar nasional penelitian dan 3) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan SPMI dilakukan dengan menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan. Menurut pasal 9 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 16 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Hasil yang ditemui di Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA) UNLESA bahwa dokumen SOP yang telah disusun dan ditetapkan oleh Rektor, selanjutnya LPMA berkoordinasi dengan pimpinan universitas tentang pelaksanaan atau penerapan setiap standar di masing-masing fakultas/program studi yang ada di UNLESA.

Berdasarkan hasil temuan juga menunjukkan bahwa standar tersebut telah dilaksanakan. Akan tetapi, untuk memaksimalkan pelaksanaan SOP tersebut memang butuh waktu dan dukungan tidak hanya dari segi dokumen, tetapi mengenai kelengkapan sarana prasarana, SDM, komitmen dari tim internal, kerja sama dari semua pihak agar LPMA dapat bekerja secara maksimal.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan SPMI berada pada kategori sesuai dengan index yang diperoleh yaitu 38.4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI yang ada di UNLESA telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa SOP merupakan mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh standar dalam SPMI yang ditetapkan.

Menurut (Dedy Sugiari Wibisono, 2016) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mulai dari unit kerja tertinggi hingga terendah, semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan program penjaminan mutu. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan SPMI merupakan suatu kegiatan yang seluruh pihak melaksanakan kerja terstruktur sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, yaitu penerapan standar SPMI secara bertanggung jawab, upaya bersama, konsisten dan loyal.

LPMA UNLESA telah melaksanakan dan mengevaluasi beberapa program/kegiatan namun kendala yang dihadapi adalah tim internal di lingkungan Universitas terlalu sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, pimpinan universitas dan fakultas harus menyadari bahwa penjaminan mutu merupakan indikator penting yang harus dilaksanakan. Dengan demikian pimpinan universitas maupun fakultas harus menyadarkan bahwa penjaminan mutu merupakan indikator penting yang wajib dijalankan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Cheung, 2015) menjabarkan kompetensi penting yang harus dimiliki praktisi penjaminan mutu eksternal. Kompetensi tersebut antara lain: memiliki profesional, mampu memeriksa dengan sistematis, mampu menganalisis situasi, kemampuan manajemen, reflektif, dan memiliki kompetensi interpersonal.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, efektivitas penerapan SPMI memerlukan sosialisasi atau keterbukaan terhadap isi SOP dan lebih meningkatkan pemahaman, komitmen, loyalitas dan konsistensi akan pentingnya penjaminan mutu internal dan mutu kerja, yang harus ditetapkan. dasar yang baik. Sesuai ketentuan SOP, standar masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan jelas, sehingga berdampak baik terhadap proses pencapaian tujuan dan berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, tergantung pada isi masing-masing program, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pimpinan universitas, fakultas dan proyek penelitian, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Penerapan standar dan prosedur SPMI secara keseluruhan bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab LPMA.

### **Monitoring dan Evaluasi SPMI**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam buku pedoman SPMI yang disusun oleh Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu 2018, monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/unit penjaminan mutu, untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan dan dipenuhi. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tentang monitoring dan evaluasi SPMI berada pada kategori sesuai dengan index yang diperoleh yaitu 35.2%. Hal tersebut menunjukkan dari hasil monitoring dan evaluasi bahwa pelaksanaan standar dan prosedur dalam SPMI di UNLESA telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan format instrumen/angket dari LPMA.

Menurut (Bahri, A., Suhardi, I., & Riangkaryaman, R, 2021) untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran berkualitas, perlu dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi agar proses perkuliahan dapat dikontrol agar berjalan sesuai dengan aturan yang semestinya. Monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan agar menghasilkan perkuliahan yang bermutu. Sementara menurut (Puspitawati, Y., & Markhamah, M, 2021). Dalam pembelajaran, proses monitoring dan

evaluasi tidak dapat dihilangkan karena hal tersebut menjadi salah satu komponen penyusun pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian pembelajaran, salah satu yang menjadi komponen dalam monitoring dan evaluasi adalah penilaian. Penilaian dapat dilakukan pada beberapa hal, seperti kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dalam penilaian kognitif, peserta didik diukur seberapa jauh pemahaman terhadap pengetahuan yang mereka dapatkan. Untuk dapat mengetahui pencapaian kognitif, maka bisa dilakukan dengan penilaian tugas yang berkaitan dengan wawasan atau pengetahuan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan/ pembelajaran yang bekerja sama dengan tim monev universitas dan tim audit mutu internal telah dilaksanakan. Angket disebarakan kepada 5 (lima) orang mahasiswa di setiap program studi untuk menjangking masukan dari mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di UNLESA. Angket ini menurut sekretaris LPMA ada 50 pertanyaan yang akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran oleh dosen di setiap program studi yang ada di UNLESA dengan rincian 6 pertanyaan untuk persiapan pembelajaran, 30 pertanyaan untuk pelaksanaan pembelajaran dan 14 pertanyaan untuk evaluasi hasil belajar mahasiswa. Jika sudah dievaluasi oleh mahasiswa kemudian hasilnya diserahkan kepada tim audit untuk membuat laporan atas evaluasi tersebut, sehingga dapat diketahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari setiap dosen untuk diadakan perbaikan selanjutnya, dengan membuat program/kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Monitoring dilakukan agar setiap pelaksana dapat bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP perlu secara terus menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik serta berorientasi mutu pelayanan. Evaluasi, sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring, dapat dilakukan dengan melihat substansi SOP itu sendiri atau berkaitan dengan proses penerapannya.

Berdasarkan temuan di UNLESA, monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 2 metode yaitu secara manual seperti melihat pada absen di tiap-tiap mata kuliah dan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD 4.0 UNLESA), selain itu monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan di awal dan akhir perkuliahan. Monitoring dan evaluasi juga selalu dilakukan pada saat rapat rutin diawal maupun diakhir semester atau rapat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat pula monitoring dan evaluasi melalui group whatsapp Universitas "RUANG UNLESA" yang didalamnya dosen-dosen sering diingatkan oleh LPMA mengenai kelancaran kegiatan-kegiatan seperti proses perkuliahan, jumlah tatap muka dan lain-lain berdasarkan pedoman perkuliahan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan penilaian kinerja telah dilakukan di masing-masing prodi melalui situs <https://unlesa.civitas.id/portalopr/>.

Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis. Jika sebuah institusi mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen esensial dalam budayanya. Proses evaluasi harus fokus pada pelanggan dan mengeksplorasi dua isu yaitu: (1) tingkatan dimana institusi mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal; dan (2) sejauh mana institusi mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan dan alat bukti yang menjadi obyek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari instrumen penilaian yang dibagikan dan penjelasan dari pihak pelaksana melalui rapat yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu internal sebagaimana yang dilakukan oleh LPMA UNLESA. Hasil presentase yang diperoleh dalam penelitian ini belum sampai pada nilai skor tertinggi karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses monitoring dan evaluasi.

Penilaian dan evaluasi kinerja di setiap program studi, fakultas dan universitas dapat memonitoring dan memperbaiki kinerja-kinerja secara keseluruhan, sehingga kemajuan mutu yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan adanya penilaian tersebut, UNLESA dapat melihat

langsung program studi yang memerlukan treatment khusus untuk menaikkan kinerja agar dapat meningkatkan mutu program studi lebih baik lagi. Data-data ini juga sangat membantu kerja universitas agar dapat memfokuskan diri dalam menaikkan kinerja fakultas dan program studi secara baik.

### **Tindak Lanjut SPMI**

Hasil penelitian tentang monitoring dan evaluasi SPMI berada pada kategori cukup sesuai dengan index yang diperoleh yaitu 28.8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut pelaksanaan standar dalam SPMI belum maksimal dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. SOP yang telah dikeluarkan oleh LPMA UNLESA tidak hanya semata-mata dilaksanakan serta di monitoring dan di evaluasi tapi setelah itu ditindak lanjuti secara terus menerus demi perbaikan mutu. SPMI sebagai sebuah siklus juga memerlukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara, karena lingkungan yang mempengaruhi lingkup organisasi pun dari waktu ke waktu sangatlah dinamis, oleh karena itu dalam penerapannya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sistematis artinya penjaminan mutu dilakukan dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur. Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini menjadi tolak ukur dari proses tindak lanjut ini. Apakah hasil tersebut sudah baik dan bisa dilanjutkan pelaksanaannya atau justru masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau adanya ketidak lengkapan dokumen SOP yang harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati

Wijono (dalam Mas, 2017) menyebutkan sepuluh langkah proses perencanaan penjaminan mutu, salah satunya adalah melaksanakan dan mengevaluasi upaya-upaya peningkatan mutu. Untuk mendapatkan solusi maka perlu direncanakan secara cermat dalam memonitoringnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah siklus yang biasanya dikenal dengan PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dalam penjaminan mutu model PDCA akan menghasilkan falsafah *kaizen*/ perkembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan. Model ini akan memberikan petunjuk bahwa setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam sistem penjaminan mutu harus direncanakan, diujicobakan, dievaluasi dan diterapkan dengan sungguh-sungguh setelah dilakukan perbaikan dari hasil proses evaluasi.

Dalam buku pedoman SPMI yang disusun oleh Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu 2018, peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI yaitu PPEPP pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. *Kaizen* setiap standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penilitan yang telah dilakukan peneliti yang mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan SPMI di Universitas Lelemuku Saumlaki, maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan SPMI di Universitas Lelemuku Saumlaki telah efektif dengan kategori sesuai dengan SOP, Monitoring dan Evaluasi SPMI di Universitas Lelemuku Saumlaki telah efektif dengan kategori sesuai dengan SOP, Tindak Lanjut SPMI di Universitas Lelemuku Saumlaki cukup efektif dengan kategori cukup sesuai dengan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. (2019). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 161-169. <https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.274>
- Bahri, A., Suhardi, I., & Riangkaryaman, R. (2021). Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Menjamin Mutu Perkuliahan Di Universitas Negeri Makassar. (1315-1330) <http://eprints.unm.ac.id/30231/>
- Batkunde, Y., Pd, S., & Pd, M. (2022). Pelaksanaan Supervisi Akademik (Dari Teori Hingga Praktik). Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. [https://www.researchgate.net/publication/367216347\\_PELAKSANAAN\\_SUPERVISI\\_AKADEMIK\\_TEORI\\_DAN\\_PRAKTIK#fullTextFileContent](https://www.researchgate.net/publication/367216347_PELAKSANAAN_SUPERVISI_AKADEMIK_TEORI_DAN_PRAKTIK#fullTextFileContent)
- Cheung, J. C. M. (2015). Professionalism, Profession and Quality Assurance Practitioners in External Quality Assurance Agencies in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 21(2), 151–170. <https://doi.org/10.1080/13538322.2015.1051795>
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. <https://spmri.ristekdikti.go.id.pdf>. Diunduh pada 06/05/2024
- Mas, S. R. (2017). Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Paputungan, I., Ansar, A., & Mas, S. R. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *PEDAGOGIKA*, 12(1), 77-92. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i1.630>
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan+Menteri+Riset%2C+Teknologi%2C+Dan+Pendidikan+Tinggi+Republik+Indonesia+Nomor+62+Tahun+2016+tentang+Sistem+Penjaminan+Mutu+Pendidikan+Tinggi>. Diunduh pada 16/05/2024
- Puspitawati, Y., & Markhamah, M. (2021). Pola Materi Kebahasaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembelajaran Bahasa pada Buku Tematik Sekolah Dasar Kelas 1. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 124-135. <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/11388>
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi sistem penjaminan mutu internal Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17-32. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/8197>
- Wibiso, Dedy Sugiari. 2016. Implementasi Total Quality Management (TQM) pada Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Angkatan Laut. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Negeri Surabaya.